

BAB III

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
MEMAKSIMALKAN RUANG TERBUKA HIJAU TAHUN 2014-2016**

A. Identifikasi Mandat Dan Misi Organisasi.

Identifikasi mandat dan misi organisasi merupakan proses awal dan juga menentukan keberhasilan tujuan sebuah organisasi. Atau langkah, mencapai sasaran apa yang harus dicapai. Sebelum, lembaga lebih jauh mendefinisikan misi dan nilai-nilainya. Identifikasi mandat adalah mengenali dan memperjelas sifat dan makna mandat baik formal maupun informal. Sehingga, konteks Pemerintahan Kota Yogyakarta sebelum masuk ke ranah pengidentifikasian misi keorganisasian, tentunya terlebih dahulu mengetahui secara pasti persyaratan apa yang harus dilakukan.

Persyaratan itu, dikondisifikasi dalam mandat formal atau Peraturan Walikota Yogyakarta No. 64 tahun 2013. “Tentang permohonan pengadaan dan pemanfaatan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat”. Dan merujuk pada “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor PRT/1/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Bidang Penataan Ruang”. Mencakup : informasi penataan ruang, sasaran tersedianya peta digital. Dan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan sasaran tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan. Serta, capaian terget harus jelas dan

tidak keluar dari pedoman audit pemanfaatan ruang Kementian Pekerjaan Umum. Tujuannya, adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi serta standar yang telah disetujui dan diterima. Ada dua indikator, secara langsung memberikan pemahaman tentang identifikasi mandat dan misi organisasi adalah sebagai berikut :

1) Tolok ukur dalam kinerja organisasi.

Agar suatu rencana strategis menjadi efektif, efisien dan akuntabel. Manajemen organisasi Pemerintahan Kota Yogyakarta harus jelas mengidentifikasi lingkup organisasinya. Baik itu mandat secara formal maupun mandat secara informal berupa mengakomodasi masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam peningkatan Ruang Terbuka Hijau. Serta, kelompok non formal/forum peduli kota hijau sebagai sarana penunjang tujuan. Sasaran pengidentifikasian mandat itu berupa interpretasi apa yang diperlukan sebagai hasil dari mandat itu sendiri. Serta, pengkopilasian mandat baik mandat formal maupun no formal. Sebab, partisipasi aktif masyarakat sangat baik dan membantu kelancaran pengawasan atau pemeliharannya. Selanjutnya, tujuan mengklarifikasi ini, untuk menemukan apa yang mungkin tidak diatur. Sebab, begitu penting untuk tetap mengarahkan anggota organisasi tentang apa yang harus mereka lakukan. Atau, mengarah pada suatu diskusi yang bernilai tentang apa misi organisasi yang

seharusnya direalisasikan. Hal ini, sebagaimana pernyataan narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Identifikasi mandat itu langkah awal pengambilan keputusan. Sehingga, perlu adanya kompilasi mandat formal dan informal. Dan penting mengidentifikasi isu-isu yang memang strategis. Karena isu strategis memang menginformasikan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Seterusnya, dikaji secara saksama untuk menemukan unsur-unsurnya. Sehingga, dibuat suatu langkah strategis dalam menghadapi isu tersebut. Juga, mengenai apa yang dibutuhkan. Sehingga, pada pelaksanaannya nanti anggota bisa ingat tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi.”¹

Dari data diatas, dapat dijelaskan. Bahwa, Agar suatu rencana strategis menjadi efektif, manajemen organisasi Pemerintahan Kota Yogyakarta harus jelas mengidentifikasi lingkup organisasinya. Terutama, mengidentifikasi mandat dan misi keorganisasian. Tidak lain adalah mengklarifikasi apa yang menjadi kepatutan untuk mereka lakukan. Identifikasi mandat dan juga misi keorganisasian merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebagai satuan sistem pencapaian sasaran dan tujuan. Yaitu, memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik berupa pemanfaatan ruang, dan peningkatan fasilitas RTH. Langkah strategis, harus dilalui dengan mengklarifikasi mandat formal dan mandat non formal. Tidak lain adalah, menemukan unsur-unsur yang tersedia atau belum tersedia dalam sebuah mandat. Atau

¹ Hasil wawancara dengan bapak purwanto selaku seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kamis tanggal 19 bulan 11 tahun 2015.

mengklarifikasi tentang apa yang tidak boleh diabaikan. Serta, mensiasati anggota (staf) kepada apa yang mesti dilakukan.

Dibalik itu, pengklarifikasian isu-isu yang memang strategis memang perlu dilakukan. Keberadaan, isu strategis merupakan informasi penting bagi suatu lembaga dalam mengambil keputusannya. Penggunaan isu, sebagai dasar strategi yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan rencana aksi yang selanjutnya dilaksanakan. Terutama, menyangkut kepatutan langkah atau berupa unsur-unsur pelaksanaan yang dibutuhkan dan diperbolehkan. Sementara, lain sisi menjamin prosedur kerja efektif bagi anggota-anggota yang diwajibkan menjalankan tugas tersebut. Artinya, bahwa melaksanakan aksi kebijakan tidak terlepas dari aturan main (berupa peraturan) yang menjadi landasan formil serta interpretasi terhadap kondisi internal dan eksternal yang sudah tercantum dalam mandat atau belum.

Selanjutnya, tentang pentingnya misi keorganisasian. Sebab, misi menjadi alat konsensus akan kekuatan organisasi mengenai tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, misi merupakan makna dari tujuan itu sendiri. Atau, tanpa misi keorganisasian, tujuan tidak mungkin dicapai. Sehingga, misi dapat mengklarifikasi tujuan organisasi atau mengapa sebuah organisasi melakukan apa yang harus dilakukannya. Lain sisi, mempertegas sikap untuk bertindak dalam memenuhi misinya. Tujuan mengidentifikasi/mengklarifikasi misi dalam konteks memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah

untuk menspesifikasi nilai secara sosial, ekonomi, ekologis maupun budaya. Sehingga, secara jelas dapat diketahui dari pernyataan narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Perlunya pengidentifikasian misi sebab kita harus melihat keutamaan nilai-nilai yang lahir dan paling dibutuhkan. Dan bisa mengikat masyarakat banyak. Apalagi dalam, menggalang kekuatan pembangunan ekonomi. Harus lebih peduli terhadap masyarakatnya. Masyarakat menjadi stekholder utama penerima sasaran kebijakan). Sehingga, peningkatan sarana dan prasarana daerah (berupa penyediaan fasilitas RTH) itu kewajiban yang termuat dalam mandat organisasi.hal ini, kan bisa menjadi saran kekuatan pemerintah untuk lebih bertanggungjawab (akuntabilitas kepermerintahanya). Caranya itu, melihat dan menganalisa stekholder dan masyarakat. Karena itu memberikan informasi berguna dan bermanfaat bagi misi. Kemudian sektor atau wilayah tindakan bergerak sesuai aturan main yang ada”²

“Pengambilan keputusan selalu berawal dari masalah. Pemerintah lebih responsif dalam pengambilan keputusan dengan cara meringkai isu untuk mengirimnya ke pengambilan keputusan. Selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa keputusan dan kerangka aksi. Sehingga secara teknisnya nanti dengan mudah dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.”³

Dari data diatas, dapat dijelaskan. Bahwa, identifikasi misi organisasi sebagai satuan sistem setelah identifikasi mandat. Analisis stkholder disini, dapat dipahami sebagai pengantar yang sangat bermanfaat pada pernyataan misi. Penting, karena penulis melihat keberhasilan suatu kebijakan dalam sektor publik. Pelaku, perencanaan

²Ibid.

³ Ibid.

strategis harus menelaah nilai dan menspesifikasikan sasaran kebijakan. Sehingga, sepatutnya suatu lembaga mengkarifikasi misi untuk menempatkan tujuan dan filosofi ataupun nilai-nilai yang mejadi panduan organisasi. Selanjutnya, kepuasan stekholder adalah kunci sebuah lembaga. Sebab, jika suatu lebaga tidak mengetahui stekholdernya, dan apa kriteria yang digunakan untuk mereka nilai suatu organisasi. Serta, bagaimana kinerja suatu organisasi terhadap kriteria stekholder. Maka, akan berdampak pada kecepatan sebuah organisasi mengetahui apa yang menjadi kepuasan bagi stekholder.

Sementara, prinsip akuntabilitas pemerintah dalam menanggapi masalah publik tentunya tidak terlepas dari kewajiban dan amanah. Bahwa, pemerintah lebih mementingkan kepentingan publik dan bertanggung jawab atas proses dan keberlangsungan lembaga dengan masyarakatnya. Sedangkan, rencana aksi kebijakan RTH tidak juga keluar dari rancangan teknis brupa pertimbangan efektifitas yaitu masalah nilai, misi serta fungsi sebagai agen pembangunan. Dan persoalan efisiensi dalam hal ini adalah pertimbangan keuntungan secara ekonomis yaitu : pertimbangan pendapatan laba dari ketersediaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Oleh karena, itu tolok ukur kinerja organisasi ini hanya dapat dilihat dari daya tanggap terhadap maslah publik, akuntabilitas, responsibiliti, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

2). Capaian Tujuan.

Rencana strategis harus dimulai dengan menyatakan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan, menyangkut apa yang harus dicapai oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta. Tujuan berkenaan dengan keinginan mencapai target 20% untuk peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Dan 80% peningkatan Ruang terbuka Hijau (privat). Selain itu, adalah memberikan penyediaan fasilitas memadai bagi kenyamanan secara ekologis, sosial, ekonomi maupun budaya.

“Capaian tujuan keseluruhan yang ingin dicapai pemerintah adalah 20% RTHP. Sementara RTH priyat sebesar 80%. RTHP perkotaaan pemerintahan kota Yogyakarta sekarang melakukan pembelian tanah-tanah dari masyarakat untuk ditingkatkan menjadi RTH-RTH wilayah. Mampu meningkatkan kenyamanan, baik interaksi sosial melalui kualitas dan kuantitas RTHP. Dan kabupaten lain yang terterah masih dalam proses dan usaha agar bisa terpenuhi.”⁴

Dari data ini, dapat dijelaskan. Bahwa, capaian tujuan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan Pemrintahan Kota Yogyakarta. Sehingga, sasaran kegiatan dari RTHP lebih ditempatkan pada pemberdayaan ruang kosong menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Selanjutnya, prioritas lebih besar untuk RTH Privat ketimbang RTH Publik. Disebabkan, penyediaan lahan publik yang masih kurang mendukung. Output dari, rencana kebijakan yang tidak lain adalah tujuan itu sendiri adalah 20% untuk Ruang

⁴ Ibid.

Terbuka Hijau (RTH) Publik dan 80% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat. Sementara, peningkatan RTHP perlu melalui suatu regulasi lain seperti pembelian lahan masyarakat kemudian difungsikan menjadi RTH Publik. Sisi lain, RTH Publik mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat seperti penunjang kelancaran interaksi sosial maupun kenyamanan secara ekologis.

Sedangkan, pemerataan RTH Publik belum dikategorikan merata sebab masih banyak Kabupaten lain yang harus mendapat perhatian terkait peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dari Pemerintahan Kota Yogyakarta. Sehingga, capaian tujuan ini merupakan dasar dari Pemerintahan Kota Yogyakarta menjalankan kebijakan sebagaimana tertuang didalam penjelasan mandat keorganisasian.

B. Analisis Lingkungan Strategis.

Untuk dapat memahami lingkungan internal organisasi, tentunya harus melihat secara kritis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang atau ancaman dari luar yang kemungkinan menjadi faktor keterhambatan program. Oleh karena itu, indikator dibawah ini menjadi sarana melihat bagaimana kondisi Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau, ialah sebagai berikut :

1) Sumber data yang dimiliki.

Sumber data dikatakan kekuatan utama internal lembaga. Suatu tujuan dan misi itu dapat tercapai atau tidaknya. Tentunya, tolok ukur pelaksanaan dilihat dari kekuatan lingkungan internal organ. Berupa data-data yang harus dimiliki. Data-data yang dimaksudkan disini adalah sumber daya manusia, dana, sarana, fasilitas, struktur dan budaya organisasi. Sementara, kekuatan data yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta masih ada beberapa hal yang perlu untuk dioptimalkan. Seperti, pendanaan. Sedangkan, menyangkut sumber daya manusia, sarana, fasilitas, struktur dan budaya organisasi (budaya kerja sama) sudah dikatakan memenuhi kriteria baik. Hal demikian, sebagaimana pernyataan narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Tantangan yang paling dominan adalah penyediaan lahan dan pendanaan. Sementara kondisi internal : sumber daya manusia tidak terlalu lemah. Sebab, kondisi pimpinan (koordinasi) maupun anggota-anggota (staf) yang dimiliki sudah cukup baik. Mulai, dari etos kerja, keaktifan dan kapabilitas staf. Hanya ketersediaan lahan dan pendanaannya saja. Sedangkan, penyediaan fasilitas sudah lumayan memadai dan budaya keorganisasian, kami senantiasa menggalang kerja sama. Baik pimpinan dan sataf. Maupun staf dengan stafnya. Konflik, memang benar diminimalisir.”⁵

Dari data diatas, penulis dapat jelaskan. Bahwa, kepemilikan data merupakan faktor utama pelaksanaan program. Atau, usaha

⁵ Ibid.

pencapaian tujuan. Tentunya, tidak terlepas dari sumber-sumber yang menjadi kekuatan internal lembaga. Kekuatan internal, Pemerintahan Kota Yogyakarta sebagaimana program peningkatan RTH. Kekuatan dana menjadi problem penyediaan fasilitas RTHP, diseluruh kawasan publik pemerintah. Sementara, kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dilihat dari keaktifan dan kapabilitas keanggotaan (staf) sudah memenuhi kriteria baik. lain sisi, profesionalisme kinerja mulai dari koordinasi tingkat struktural (pimpinan dengan bawahan) maupun praktek kerjasama antara staf-staf sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sehingga, budaya internal organisasi dalam tahapan ini sangat menunjang proses maupun pelaksanaan kebijakan RTH.

2) Kinerja yang tercapai

Kinerja yang tercapai, bagi penulis adalah ukuran keberhasilan dari seluruh rencana pencapaian sasaran maupun target tujuan. Bilamana, sebuah tujuan sudah secara optimal berhasil atau masih dalam tahapan evaluasi hasil. Sebab, terdapat berbagai kendala yang mungkin menjadi problem teknis pelaksanaan program RTHnya. Atau, prosentasi hasil capaian target perlu dilihat secara jelas sehingga ukuran pelaksanaan akan lebih efektif dan efisien. Cakupan keberhasilan RTHP Kota Yogyakarta pada tahapan ini, masih dalam proses memaksimalkan untuk diseluruh wilayah dibawah naungan Kota Yogyakarta. Ruang lingkup menjadi sektor garapan, mulai dari RTHP lingkungan perkotaan (PEMKOT), RTHP Kabupaten Sleman,

RTHP Kabupaten Bantul, RTHP kabupaten Kulonprogo dan RTHP Kabupaten Gunung Kidul. Sektor garapan RTHP, untuk semua Kabupaten dibawah naungan Pemerintahan Kota Yogyakarta secara dapat dilihat dari pernyataan narasumber dibawah ini :

“Capaian kinerja untuk RTH yogyakarta tahun 2014. Untuk RTH publik Yogyakarta itu masih sekitar 18,96 % atau 86,05 dari luas kawasan perkotaan. Dan itu terpenuhi. Untuk kabupaten sleman, RTHP nya sebesar 20% sudah masuk dari luas kawasan perkotaan sebesar 100%. Sementara, untuk RTH Bantul yaitu masih 11, 78% dari luas kawasan perkotaan. Atau masih 58,9 % keterpenuhannya. Sedangkan untuk Kabupaten Gunung Kidul untuk kawasan perkotaannya, dari luasan 2.986 Ha. Jadi luasan RTH lebih besar 20%. Dan Kabupaten Kulonprogo RTHPnya masih sangat minim. Baru 8,90% kawasan perkotaan. Jadi diperkirakan 44%.”⁶

Merujuk pada data diatas, penulis dapat jelaskan. Bahwa, capaian kinerja untuk RTH Yogyakarta tahun 2014. Untuk, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik masih brkisar 18,96 dari luas kawasan perkotaan sudah terpenuhi. Sedangkan, untuk Kabupaten seleman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik masih berkisar 20 prosen sudah masuk dari luas kawasan perkotaan sebesar 100 prosen. Dan, untuk RTH Publik Kabupaten Bantul yaitu masih 11, 78 prosen dari luas kawasan perkotaan. Atau masih 58,9 prosen keterpenuhannya. Sementara, Kabupaten Kulonprogo Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik masih sangat minim yang besarannya sekitar 8,90% kawasan perkotaan. Sehingga diprosentasikan menjadi 44 prosen. Totalitas,

⁶ Hasil wawancara dengan bapak purwanto selaku seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kamis tanggal 19 bulan 11 tahun 2015.

target secara keseluruhan yang ingin dicapai pemerintah adalah 100% yang dapat diklasifikasikan menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan target capaian 80% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat. Sedangkan, untuk kabupaten lain juga menjadi pusat atau sektor garapan RTHP oleh pemerintah. Tetapi, hal itu masih dalam proses dan tahapan persiapan agar semua Kabupaten bisa mendapatkan fasilitas RTHP yang memadai.

b). Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam proses lelang tahun anggaran 2015

Tabel 2.5
Lokasi pembuatan RTH Publik (Proses Lelang) tahun Anggaran 2015

No	LOKASI			LUASAN
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	
Proses Lelang				
1	Gondaman	Demangan	05	295 m ²
		Klitren	09	700 m ²
JUMLAH				995 m ²

Sumber, data skunder BLH yogyakarta tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.2. Lokasi pembuatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) mengenai proses lelang untuk tahun anggaran 2015, hanya satu kecamatan. yaitu, kecamatan Gondaman meliputi dua kelurahan yang ada (kelurahan Demangan seluas 295 m² dan kelurahan Klitren seluas 700 m². Sehingga, total keseluruhannya adalah 995 m².

c). **Pembuatan Ruang Terbuka Hijau FASHUM Kota Yogyakarta Tahun 2013**

Tabel 2.6
Pembuatan Ruang Terbuka Hijau FASHUM Kota Yogyakarta Tahun 2013

No	Kelurahan	Anggaran	Luas
1	Purbayan	50,000,000.00	355 m ²
2	Mantrijeron	48,000,000.00	549 m ²
3	Wirogunan	50.000.000.00	360 m ²
4	Tahunan	142,000,000.00	377 m ²
5	Sorosutan		131 m ²
6	Bener	50,000,000.00	244 m ²
7	Brontokusuman	70,000,000.00	474 m ²
8	Tegalpanggung	165,000,000.00	456 m ²
9	Baciro		492 m ²
10	Terban		183 m ²
11	Rejowinangun	60,000,000.00	660 m ²

Sumber, data sekunder BLH yogyakart tahun 2013.

Pada tabel 3.3 tentang Pembuatan Ruang Terbuka Hijau FASHUM Kota Yogyakarta Tahun 2013. Maka, penulis selanjutnya menjelaskan. Bahwa, terdapat sebelas kelurahan yang mendapat Ruang Terbuka Hijau FASHUM. Diantaranya, ialah kelurahan Purbayan dengan pembiayaan/anggaran sebanyak Rp 50,000,000.00 dan luas sebesar 355 m². Mantrijeron, dengan pembiayaan/anggaran sebanyak Rp 48,000,000.00 dan luas sebesar 549 m². Wirogunan, dengan pembiayaan/anggaran sebanyak Rp 50.000.000.00. dan luas sebesar 360 m². Sementara kelurahan Tahunan dan Sorosutan mendapat anggaran yang sama sebanyak Rp 142,000,000.00. dan luas 377 m², untuk kelurahan Tahunan sedangkan 131 m², untuk

kelurahan Sorosutan. Kelurahan Bener mendapat anggaran yang sama sebanyak Rp 50,000,000.00. dan luas sebesar 244 m². Kelurahan Brontokusuman anggaran sebanyak Rp 70,000,000.00. dan luas sebesar 474 m². Sedangkan kelurahan Tegalpanggung, kelurahan Baciro dan kelurahan Terban, mendapat anggaran yang sama sebanyak Rp 165,000,000.00. dan luas 456 m² untuk kelurahan Tegalpanggung, kelurahan Baciro seluas 492 m², sedangkan 183 m² untuk kelurahan Terban. Dan yang terakhir adalah kelurahan Rejowinangun, anggarannya sebanyak Rp. 60,000,000.00 sementara luas yang digunakan sebesar 660 m².

3) *Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)*

Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT), merupakan suatu petunjuk teknik pengembangan sebuah strategi. Analisis, SWOT sangat bermanfaat bagi pelaku kebijakan untuk mendapat gambaran yang lebih konferhensif. Terutama, mengenai peluang eksternal, ancaman-ancaman eksternal, kekuatan-kekuatan internal lembaga (organisasi), kelemahan-kelemahan internal. Oleh karena itu, indikator SWOT dibawah ini memperjelas faktor pemaksimalan RTH adalah sebagai berikut :

a. **Analisis peluang dan tantangan Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam program Ruang Terbuka Hijau tahun 2014**

lingkungan eksternal menjadi aspek strategis bagi kondisi internal. Atau dalam hal lain, ialah menjamin roda organisasi pemerintah

berjalan diatas standariasi dan sasaran target yang telah dirncanakan. Lingkungan eksternal, sangat besar pengaruhnya terhadap lembaga untuk terus berhasil atau mengalami kemunduran (gagal). Dua aspek ini, merujuk pada kondisi *Opportunity* atau Peluang dan *Threat* atau Tantangan. *Opportunity* atau peluang dianggap sebagai bagian dari lingkungan eksternal lembaga pemerintah yang dapat menjadi potensi untuk terus maju dan berkembang. Sedangkan, *Threat* atau Tantangan adalah kebalikan dari *Opportunity*, yang merupakan halangan atau ancaman yang menyebabkan suatu lembaga mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Maka, lebih konkritnya peluang dan tantangan penulis tampilkan dalam bentuk tabel sebagaimana dibawah ini, ialah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Analisis peluang dan tantangan Pemerintahan Kota Yogyakarta
dalam program Ruang Terbuka Hijau tahun 2014.

O (Peluang)		T (Ancaman)
1	Akses kota pariwisata	Intensitas pemeliharaan RTH
2	Meningkatnya kesadaran penggunaan RTH	Meningkatnya pembangunan fasilitas publik diluar RTH.
3	Interelasi dengan forum-forum resmi RTH	Semakin berkurangnya ketersediaan lahan RTH publik
		Kurang adanya loyalitas masyarakat dalam menyediakan lahan

Sumber, Hasil wawancara dengan Veri Tri Jatmiko, Ssi, MM. Kepala Sub Bidang Perindang Jalan balai Kota Yogyakarta. Tggl 3 bulan 11 tahun 2015.

Dari tabel 3.4 diatas, penulis dapat jelaskan. Bahwa, fungsi penyelidikan lebih kompleks adalah demi melihat sejauh mana peluang yang dimiliki pemerintahan kota. Penyelidikan terhadap peluang, akan membantu sinergisitas kerjasama lintas departemen pemerintahan. Merujuk pada tabel ini, akses pariwisata kota seiring dengan kecenderungan pariwisata menjadi akses distribusi ekonomi pemerintah. Sehingga, wilayah pengembangan ekonomi tampak pada kecenderungan potensial antara fasilitas RTH dengan meningkatnya kepedulian disektor pariwisata sebagai keunggulan kompotitif. Akhirnya, interelasi forum-forum menjadi suatu wahana kotributor dan bagaimana hubungan itu dimanfaatkan untuk mengejar berbagai misi dan agenda RTH. Sementara, menjadi ancaman terbesar bagi keberadaan Ruang Terbuka Hijau adalah tuntutan kebutuhan dan memang tidak bisa dihindari. Kecenderungan meningkatnya fasilitas publik meningkatnya pembangunan berupa gedung-gedung baru (hotel-hotel) atau fasilitas lain diluar RTH mengakhibatkan kurang tersedianya RTH. Lain pihak, pimpinan harus mampu memenejerial keputusan strategis untuk menekan keenggangan para *stekholder* (masyarakat) untuk bekerja sama. Bukan hanya sebatas persoalan loyalitas, melainkan lebih subtansial adalah mengambil keuntungan dari keputusan politik. Seperti, semakin tingginya harga tanah yang diwilayah sekitar kota Yogyakarta. Sedangkan, semakin berkurang

ketersediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik menjadi faktor ancaman akan kuantitas RTH publik memadai diseluruh kawasan kota. Hal ini juga, didukung oleh pernyataan narasumber sebagaimana dibawah ini, ialah :

“Penyediaan fasilitas RTH itu didukung oleh peraturan. dan sangat membawa manfaat bagi masyarakat. Terus, sekarang banyak masyarakat yang sudah mendukung dan terlibat. Rasa jenuh dirumah, mereka lebih memilih reflesing didaerah sekitar RTH. Ini sangat baik bagi peningkatan ekonomi dan menjalin interaksi sosial. Apalagi, jogaja mulai memaksimalkan sektor pariwisatanya juga. Jadi, sangat pontensial. Keterlibatan masyarakat pemerintah sudah terbetuk diwilayah kota Yogyakarta. Keterlibatan mereka dibentuk dalam forum-forum resmi. Seperti forum Winongo, forum Jode. Dan itu, sangat mendukung relasi RTH. Sementara harus kita hadapi itu, melambungnya harga tanah, perluasan fasilitas (gedung) berkurangnya lahan dll. Itu, membuat pemerintah harus lebih tanggap.”⁷

Dari data ini, penulis dapat jelaskan. Bahwa, bicara peluang adalah berbicara mengenai faktor-faktor produktif dan mendorong suatu lembaga itu terus berkembang dan maju pada sektor kerjanya. Khususnya, terkait kebijaksanaan penyediaan fasilitas RTH Publik. Ruang Terbuka Publik (RTH) Pubik, sangat berfungsi bagi keberlangsungan hidup spesies binatang dan manusia. Keterlibatan masyarakat sangat mendrong keberhasilan usaha. Sedangkan, kesadaran masyarakat mulai meningkat bahwa RTH bisa memberi solusi bagi kepenatan fisik maupun kejenuhan akal manusia. Sehingga, jalan terbaik adalah memilih untuk

⁷ Hasil wawancara dengan Veri Tri Jatmiko, ssi, mm. Kepala Sub Bidang Perindang Jalan balai Kota Yogyakarta. Tggl 3 bulan 11 tahun 2015.

memanfaatkan RTH sebagai sarana reflesing. Semakin, sering masyarakat memanfaatkan RTH, maka semakin menarik daya tawar bagi kahlayak banyak. Dan semakin, banyak pengguna RTH Publik maka semakin efisien dalam peningkatan PAD pemerintah. lain sisi, distribusi RTH seiring dengan upaya memaksimalkan sektor wisata Yogyakarta dan hal itu merupakan potensi bagi sinegistasnya instansi dalam hubungan koodinasi dan kerjasama. Dan semakin luasnya interelasi dengan forum-forum maka sekaligus membangun koneksisitas produktif dalam pencapaian misi RTH itu sendiri. Perlu diprioritaskan melalui misi startegis tentang potensi-potensi yang ada karena itu menjadi peluang penting bagi, keberlangsungan RTH kota.

a. Analisis kekuatan dan kelemahan internal Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam program Ruang Terbuka Hijau tahun 2014

Lingkungan internal lembaga (organisasi), memprioritaskan pada dua aspek penting sekaligus menjadi landasan pengambilan suatu kebijakan sebagaimana tertuang dalam mandat keorganisasian. Dua aspek ini merujuk pada kondisi kekuatan/*Strength* yang dimiliki secara internal dan *Weakness* / Kelemahan. Sementara, *strength* (kekuatan) dalam hal ini diartikan sebagai kekuatan atau hal positif yang dapat dijadikan sebagai aset Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam menjalankan program kebijakan RTH. Seperti : kemampuan sumber daya manusia, fasilitas, koordinasi kerja sama yang baik sebagai budaya organisasi.

Lebih konkrit tentang masalah Kekuatan/*Strength* internal lembaga, maka penulis tampilkan dalam bentuk tabel sebagaimana dibawah ini, ialah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Analisis kekuatan internal Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam program Ruang Terbuka Hijau tahun 2014

S (Kekuatan, Potensi)		Strategi SO	Strategi ST
1	Etos kerja yang tinggi dan orientasi kearah tindakan	Konsentrasi pada pencapaian sasaran dalam peningkatan kuantitas dan kualitas RTHP demi menunjang manfaat dan fungsi RTH.	Intensitas penyebaran informasi bagi RTH dan koordinasi antar unit organ sebagai akses kontrol serta sinkronisasi kearah tindakan terpadu.
2	Kapabilitas staf, pengabdian dan kerjasama yang tinggi		
3	Tenaga terampil, stabilitas dan kemampuan bertindak		

Sumber, hasil wawancara dengan Veri Tri Jatmiko, Ssi, MM. Kepala Sub Bidang Perindang Jalan balai Kota Yogyakarta. Tggl 3 bulan 11 tahun 2015.

Dari tabel 3.5 diatas dapat penulis jelaskan. Bahwa, kekuatan itu harus diklarifikasi agar mampu melegitimasi pada proses pelaksanaan. Atau, sebagai mesin penggerak bagi perkembangan, kemajuan pertumbuhan maupun inovasi pelayanan. Dasar mengidentifikasi kekuatan adalah menemukan komponen dominan dan menjadi keunggulan yang harus dipertahankan. Seperti : Etos kerja yang tinggi dan orientasi kearah tindakan, adalah motor penggerak dalam pencapaian misi strategis yang lebih kompotitif dalam RTH. Persaingan, diimbangi atau berlangsung secara kompotitif karena etos kerja dan kemampuan bertindak dimiliki setiap anggota (staf) itu baik. Begitu juga kapabilitas, yang dalam pemahamannya

adalah kemampuan menejerial maupun kemampuan melakukan tindakan. Kapabilitas ini, akan menjadi faktor penggerak setiap komponen untuk lebih reaktif, lebih inovatif, lebih produktif, komitmen dan lebih respon terhadap setiap hal yang menjadi keharusan bagi mereka. Selanjutnya, dukungan keterampilan dan stabilitas mampu menjaga dinamika keorganisasian. Dan, paling substansial adalah menjaga kemerosotan organisasi kedalam ketidakmampuan bersaing. Oleh karena, itu keterampilan perlu ditonjolkan menjadi suatu sarana bekerja efektif, efisien dan produktif. Dukungan keterampilan, mendukung setiap komponen bekerja efektif, efisien didalam satuan secara sistem kinerja. Oleh karena, kekuatan dan potensi mampu membawahkan mereka bergerak kearah tindakan konkrit yaitu penyediaan fasilitas RTH dalam arena kebutuhan. Guna meraih peluang organisasi kedepan, konsentrasi pada capaian sasaran dalam peningkatan kuantitas dan kualitas RTHP sebagai satuan langkah mendistribusikan manfaat dan fungsi RTH.

Maka intensitas penyebaran informasi bagi kegunaan RTH merupakan pola edukasi (pendidikan) dan koordinasi antar unit organ merupakan cara pengontrolan yang baik dalam menghadapi ancaman. Sinkronisasi kearah tindakan terpadu difungsikan sebagai alat untuk menjaga kestabilan dalam proses pelaksanaannya. Yaitu menghadapi sulitnya ketersediaan lahan maupun melonjaknya pembangunan fasilitas diluar fasilitas RTH. Hal ini, juga secara subjektif dapat dilihat dari dukungan pernyataan narasumber dibawah ini, ialah sebagai berikut :

“Kondisi internal : sumber daya manusia tidak terlalu lemah. Sebab, kondisi pimpinan (koordinasi) maupun anggota-anggota (staf) yang dimiliki sudah cukup baik. Mulai, dari etos kerja, keaktifan dan kapabilitas staf. Hanya ketersediaan lahan dan pendanaannya saja. Sedangkan, penyediaan fasilitas sudah lumayan memadai dan budaya keorganisasian, kami senantiasa menggalang kerja sama. Baik pimpinan dan sataf. Maupun staf dengan stafnya.”⁸

“Skill atau kemampuan yang dimiliki staf. bisa dikatakan, mencapai rata-rata baik. seperti, tim perencanaan teknis. Tim pelaksana dan juga suda memiliki jaringan lintas koordinasi jabatan. Dikabupaten-kabupaten dibawa naungan sudah ada relasi atau jaringan distribusi yang mumpuni. Seperti Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul. Tinggal, yang lain nanti di usahakan. kami selalu menjaga reputasi kerja. Fokus bekerja Makanya, masih dinilai baik.”⁹

Kondisi internal merupakan aspek penting dalam mendistribusikan kebijaksanaan pemerintah. Terutama, dalam menjalankan program/kebijakan memaksimalkan RTH Publik. Tentunya, keberhasilan tercapai secara efektif merupakan aktualisasi dari kondisi sumberdaya atau aset-aset potensial yang dimiliki. Seperti : Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terlalu lemah. Koordinasi pimpinan yang baik, serta situasi kerja dalam hal senantiasa melanggengkan kerja sama adalah potensi keberhasilan terbesar. Penulias melihat, bahwa adapun suatu perencanaan yang baik sementara fasilitas dan pendanaannya memenuhi. Namun, ada kesenjangan dalam hal keterbatasan SDM maupun kejanggalan pada proses koordinasi pimpinan/staf. Maka, potensi terbesar untuk misi dan tujuan program adalah

⁸ Hasil wawancara dengan bapak purwanto selaku seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kamis tanggal 19 bulan 11 tahun 2015.

⁹ Ibid.

tidak akan direalisasikan dengan baik. Sebaliknya, jika SDM dan tingkat budaya organisasi maupun tingkat koordinasi yang baik.

Namun, keterbatasan operasional/pendanaan dalam perealisasi program RTH. Maka keberhasilan, dalam konteks memaksimalkan RTH juga akan mengalami keterhambatan. Seperti efektivitas waktu pencapaian sasaran. Lain sisi, ketersediaan SDM perlu ditunjang dengan keahlian/skill atau berupa pengetahuan khusus dalam menjalankan tugas yang diemban. Karena, skill sangat rentan terhadap keberhasilan mencapai target sasaran dibalik penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Sementara, konteks pemaksimalan RTH. Skill atau kemampuan yang dimiliki staf bisa dikatakan, mencapai rata-rata baik. spesifikasi dari Sumber Daya Manusia ini seperti, tim perencanaan teknis, tim pelaksana. Dan juga ditunjang oleh distribusi jaringan lintas koordinasi jabatan di Kabupaten-kabupaten juga terpenuhi. Seperti : Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Artinya, bahwa aset SDM dan distribusi jaringan adalah sarana kekuatan untuk cukup menentukan pencapaian tujuan.

b. Analisis kelemahan internal Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam program Ruang Terbuka Hijau tahun 2014

Tabel 2.9
Analisis kelemahan internal Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam program Ruang Terbuka Hijau tahun 2014

W (kelemahan)		Strategi WO	Strategi WT
1	Ketersediaan pendanaan	Mengkombinasikan jaringan fungsional sebagai akses peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas RTHP.	Memaksimalkan kerja sama dan koordinasi untuk menekan anggaran (efisiensi anggaran)
2	Akses penyediaan lahan		

Sumber, Hasil wawancara dengan Veri Tri Jatmiko, Ssi, MM. Kepala Sub Bidang Perindang Jalan balai Kota Yogyakarta. Tgg1 3 bulan 11 tahun 2015.

Merujuk pada tabel 3.6 diatas. Maka, indikator ini memperlihatkan bahwa ada dua kelemahan yang paling substansial dimiliki pemerintahan kota yogyakarta dalam RTH Publik. Meskipun, kemampuan manajerial, SDM mewadahi seluruh aktifitas penyediaan fasilitas RTH. Namun, kurangnya ketersediaan dana tentunya sangat membawa kendala operasionalisasinya. Seluruh, misi menajemen bukan tidak semuanya direalisasikan melainkan tidak banyak yang belum menjapai target sebab kekurangan pendanaan. Selain itu, akses penyediaan lahan menjadi aspek kelemahan kedua setelah keterbatasan dana. Sehingga, perlu dilakukan melalui strategi konsensus sebagai cara mengatasi kelemahannya yaitu membangun kenekasi kerjasama yang baik diluar struktur jabatan fungsional (masyarakat). Atau mencukupi kebutuhan akan lahan maupun pendanaan bagi RTH, berakhibat pada mencari kesepakatan (negosiasi) dalam bentuk sinergisitas visi manajemen

menghadapi perluasan sektor pariwisata kota. Dan bagaimana, meminimalisir kelemahan menghadapi ancaman adalah memaksimalkan kerja sama dan koordinasi untuk menekan anggaran pelayanan (efisiensi anggaran). Kemudian, persoalan ini secara subjektif dapat dilihat dari pernyataan narasumber dibawah ini, ialah sebagai berikut :

“Kelemahan didalam kebijakan RTH ini adalah ketersediaan lahan pemerintah. dan pendanaan. tanah harus dibeli dari masyarakat sebab tanah pemerintah sudah terbatas untuk arela publik. dari sinilah peran masyarakat dilibatkan dalam pemaksimalan RTH. Caranya ialah, jika ada lahan yang kosong dan mau dibuat RTH maka segera disampaikan ke pemerintah melalui kelurahan dan kecamatan. Makanya, langkah strategis yang bisa diangkat adalah pelibatan peran masyarakat sekaligus berkomitmen melihat peluang dan kekuatan internal lembaga. Sehingga, pemerintah tetap berkomitmen pada standar dan pencapaian target. Ret-ret pencapaian target sudah dimiliki. Jadi untuk RTH sendiri, semaksimal mungkin dibuat guna meningkatkan kenyamanan, interaksi sosial melalui arela publik (RTH).¹⁰

Dari data ini, dapat penulis jelaskan. Bahwa, adapun menjadi kelemahan (*weakness*) bagi pemerintahan Kota Yogyakarta adalah ketersediaan lahan pemerintah. Sehingga, tanah harus dibeli dari masyarakat sebab tanah pemerintah sudah terbatas untuk areal publik. dari sinilah peran masyarakat dilibatkan dalam pemaksimalan RTH. Proposisi, yang sama menegaskan bahwa. Meskipun, tersedianya fasilitas, koordinasi dan ketersediaan SDM yang mumpuni. Namun, aset lain seperti ketersediaan lahan dan pendanaan tidak mumpuni. Justru, menjadi faktor kelemahan bagi

¹⁰ Ibid.

siapa saja yang akan menjalankan program RTH. Untuk itu, bagaimanapun caranya. Kondisi, kekurangan baik itu pendanaan maupun lahan tidak mendukung bagi sarana fasilitas RTH. Pemerintahan Kota Yogyakarta, selalu antusias dalam mengatasi masalah ini. Konkrit dari, masalah ini ialah lahan-lahan kosong warga dan mau dibuat RTH maka segera disampaikan ke pemerintah melalui kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, akan dijadikan RTH Publik. sehingga, meminimalisir kejanggalan yang semakin luas dampak negatifnya. Pelibatan peran masyarakat adalah elemen pendukung dalam hal melancarkan lajunya kebijakan RTH.

b. Strategi Pengelolaan Input.

1. Mengkombinasikan jabatan fungsional

Langkah penting dalam mencapai sebuah tujuan keorganisasian, tentunya harus melalui disiplin teknis. Disiplin teknis ini, difungsikan sebagai alat untuk menjaga kestabilan dalam proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Atau, mendukung kelancaran usaha-usaha jangka panjang yang ingin diraih suatu lembaga. Secara teoritis, kombinasi jabatan fungsional adalah pelaksanaan dari prinsip manajemen yang merupakan kerja sama mencapai tujuan. Sebagaimana dijelaskan Luthet Gulick. Bahwa, manajemen sebagai bidang pengetahuan yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana

orang-orang dapat berkerjasama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan.¹¹

Menjaring kerjasama lintas lembaga dapat memicu suatu organisasi untuk mengawali dan mempengaruhi aktivitas sehingga dapat mengendalikan dan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Yogyakarta, dalam program memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Merupakan, bagian dari rencana teknik BLH sehingga perlu dilibatkannya lembaga lain dalam proses pengawasannya. Lembaga lain, yang pada konteks ini adalah keterlibatan instansi pemerintah (petinggi daerah) seperti pihak kecamatan dan kelurahan agar keberlangsungan program RTH dapat berjalan maksimal. Hal ini, sebagaimana pernyataan narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Untuk memaksimalkan program Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka BLH dibawah naungan pemerintah. Harus menggandeng dengan jajaran fungsional instansi lain. Petinggi daerah (pihak kecamatan, pihak kelurahan harus disertakan dalam proses pelaksanaannya. Sebab, instansi pemerintah ini mampu berkontribusi dalam proses pengawasannya. Keterlibatan mereka cukup mempengaruhi dalam pengawasannya agar program memaksimalkan RTH berjalan sesuai dengan rencana yang sudah

¹¹ Gulick, Luthet, 1995. Pengantar *Manajemen dan Pengambilan Keputusan Strategis*, Jakarta, hal 39

ditentukan. Pengawasan itu dilakukan, pada saat perencanaan sampai pada pemeliharannya dan setelah RTHP itu dibangun.”¹²

Dari data diatas, penulis dapat jelaskan. Bahwa, dalam mendukung kelacaran program memaksimalkan RTH kota yogyakarta. Langkah menjaring kerjasama BLH dengan petinggi daerah kecamatan maupun kelurahan, merupakan bentuk dari bagian teknik dan strategi yang diupayakan agar tujuan dan rencana bisa berjalan efektif atau maksimal. Keikutsertaan instansi lain, sangat penting dalam rangka mempengaruhi proses dan aktivitas RTH. Salah satu, bentuk dari keikutsertaan instansi ini adalah melakukan proses pengawasan intens sehingga suatu rencana dapat dikendalikan dengan baik. Pengawasan sendiri, juga merupakan bagian penting dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Sebab, tujuan utama dari adanya pengawasan yaitu mendorong kerja efektif, mengarahkan untuk sesuai dengan standar pencapaian tujuan serta mampu melakukan evaluasinya.

Pengawasan itu, dilakukan dilakukan secara intens dalam konteks ini adalah dilaksanakan pada berbagai proses pelaksanaannya. Kegiatan supervisi/pengawasan terhadap tahapan kualitas pekerjaan pelaksanaan fisik secara berkala. Supervisi ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan kualitas fungsi RTH. Supervisi dilakukan secara optimal mulai dari perencanaan awal, pemeliharaan dan setelah RTHP itu

¹² Hasil wawancara dengan Veri Tri Jatmiko, Ssi, MM. Kepala Sub Bidang Perindang Jalan balai Kota Yogyakarta. Tggl 3 bulan 11 tahun 2015.

dibangun. Sementara, kombinasi jabatan fungsional atau kerjasama lintas jabatan tentunya sangat mempengaruhi proses kebijakan ini. Sebab sisi kebijakan berupa : dampak, kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dari program RTH inipun dapat dikendalikan dengan baik. Sementara, kontribusi ini tidak berhenti pada faseh perencanaannya. Melainkan, lebih lanjut pada tahapan pemeliharannya. kegiatan supervisi menyangkut kegiatan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengadakan penilain pelaksanaan apakah sesuai dengan standar rencana atau tidak. Hingga, pada tahapan mengetahui apakah terjadi penyimpangan pada evaluasinya.

Sementara pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) untuk wilayah kota yogyakarta telah dilakukan semenjak tahun 2013. Semenjak dikeluarkannya peraturan walikota No 64 tahun 2013 tentang permohonan, pengadaan dan pemanfaatan tanah untuk RTH sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat. Dan itu, belum merata sebab hanya sebagian pemukiman yang berhasil terbangun serta terjaga pemeliharaan maupun fungsinya.

“Munculnya RTHP mulai tahun 2013 dilingkungan pemukiman yang berhasil terbangun dan terjaga pemeliharannya serta fungsinya. sementarta masih memiliki hambatan secara teknis. Seperti kurangnya tenaga pengawasan dan pemeliharaan. Sehingga perlu dimaksimalkan.”¹³

¹³ Ibid.

Merujuk pada data ini, bahwa klasifikasi atau pembagian Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dalam skala pemukiman baru berhasil terbangun pada tahun 2013. Dan secara teknis seperti pemeliharaan dan kejanggalan dalam aspek fungsinya. Seperti fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi masih dalam tahapan maksimal. Lain sisi, penyediaan lahan (tanah) untuk kepentingan RTH juga membutuhkan biaya.

Secara formal, relasi kerja sesama lintas fungsional. Berkesesuaian dengan amanat peraturan walikota yogyakarta No. 46 tahun 2013. Bahwa, landasan formil ini merupakan kerangka kerja yang tidak terpisahkan dari kombinasi jabatan fungsional. Penjelasan hubungan lintas fungsional RTH termuat didalam pasal 2 ayat 2 peraturan walikota No.46 tahun 2013 yang berbunyi : “Tujuan ditetapkan nya peraturan Walikota ini untuk memberikan kejelasan taat cara dalam permohonan, pengadaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Semnetara, tata cara permohonan untuk RTH dijelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi : “ permohonan RTHP diajukan oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. (Ayat 1). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mengajukan proposal pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik kepada walikota yogyakarta diketahui lurah dan camat setempat dengan tembusan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. (ayat 3).

Panduan teknis (mandat) kombinasi jabatan fungsional Hubungan secara fungsional sangat membantu dalam memaksimalkan RTH dan efektif. Dan tidak lain, adalah menjamin keteraturan prosedur administrasi pelayanan publik (RTH). Prosedur administrasi, ditetapkan guna memanejerial dokumen yang diperlukan dan sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya. Sedangkan, penyediaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta beberapa kendala yang menjadi faktor keterhambatan untuk kelancaran peningkatan RTH. Adalah, keterbatasan lahan pemerintah, maupun ketersediaan dana. Sementara, ketersediaan sarana fasilitas cukup mendukung bagi staf (anggota) dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan, kemampuan secara individu sudah cukup mendukung dibalik koordinasi dan budaya kerja sama yang baik. lain sisi, masalah terbesar dari RTH adalah menghadapi kondisi lahan yang sangat terbatas. Hal ini, sebagaimana pernyataan narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Kelemahan didalam kebijakan RTH ini adalah ketersediaan lahan pemerintah.tanah harus dibeli dari masyarakat sebab tanah pemerintah sudah terbatas untuk arela publik. dari sinilah peran masyarakat dilibatkan dalam pemaksimalan RTH. Caranya ialah, jika ada lahan yang kosong dan mau dibuat RTH maka segera disampaikan ke pemerintah melalui kelurahan dan kecamatan.Makanya, langkah trategis yang bisa diangkat adalah pelibatan peran masyarakat sekaligus berkomitmen melihat peluang dan kekuatan internal lembaga. Sehingga, pemerintah tetap berkomitmen pada standar dan pencapaian target. Ret-ret pencapai target sudah didimiliki. Jadi untuk RTH sendiri, semaksimal mungkin dibuat guna meningkatkan kenyamanan, interaksi sosial melalui arela publik (RTH).

Dari data ini, dapat penulis jelaskan. Bahwa, adapun menjadi kelemahan (*weakness*) bagi pemerintahan Kota Yogyakarta adalah ketersediaan lahan pemerintah. Sehingga, tanah harus dibeli dari masyarakat sebab tanah pemerintah sudah terbatas untuk areal publik. dari sinilah peran masyarakat dilibatkan dalam pemaksimalan RTH. Suatu langkah strategik ialah jika ada lahan yang kosong dan mau dibuat RTH maka segera disampaikan ke pemerintah melalui kelurahan dan kecamatan. Hal ini merupakan *opportunities* (peluang), yang bisa raih pemerintah. sekaligus pelibatan peran masyarakat dan berkomitmen melihat peluang dan kekuatan internal lembaga. Oleh karena itu, semua organisasi manapun dalam menjalankan program pencapaian target tujuan. Tidak terlepas dari SWOT. Dan SWOT dapat menjadi landasan manajemen keorganisasian agar tujuan dapat direalisasikan dengan baik.

Lain pihak, dapat diketahui melalui output dari adanya integrasi kerja yang kemudian mencapai target tujuan. Seperti rencana pembuatan RTH tahun 2015. Tidak terlepas dari standar yang dipergunakan, menyangkut persyaratan teknis pekerjaan seperti kuantitas, kualitas, dimensi atau ukuran. Bahkan, volume pekerjaanya juga termasuk dimensi atau ukuran. Supervisi/pengawasan lokasi pembuatan RTH. Supervisi/pengawasan lokasi Ruang Terbuka Hijau pemerintahan kota Yogyakarta dalam tahun anggaran

2015. Terbagi, menjadi dua bagian utama yaitu : RTH Seleksi Lelang dan RTH yang belum masuk ULP.

1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) seleksi lelang tahun anggaran 2015.

Tabel 3.0
Lokasi pembuatan RTH Publik (Seleksi lelang) tahun Anggaran 2015

No	LOKASI			LUASAN
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	
Seleksi lelang				
1	Gondaman	Ngupasan	07	484 m ²
		Prawirodirjan	11	378 m ²
2	Mantrijeron	Gedongkiwo	17	375 m ²
		Mantrijeron	10	521 m ²
3	Tegalrejo	Tegalrejo	09	1172 m ²
		Kricak	01	600 m ²
JUMLAH				3.530 m²

Sumber, data skunder BLH yogyakarta tahun 2015

Merujuk pada tabel 3.4 diatas, terkait lokasi pembuatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) mengenai seleksi lelang tahun anggaran 2015. Dapat dijelaskan bahwa : kecamatan Gondaman meliputi dua kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan. Masing-masing mempunyai luas sebagai berikut : Ngupasan seluas 484 m² sementara Prawirodirjan seluas 378 m². Sementara, kecamatan Mantrijeron meliputi kelurahan Gedongkiwo dan Mantrijeron masing-masing memiliki luas: Gedongkiwo seluas 375 m² dan Mantrijeron seluas 521 m². Dan, kecamatan Tegalrejo meliputi kelurahan Tegalrejo dan

kelurahan Kricak, masing-masing memiliki luas : Tegalrejo seluas 1172 m² dan Kricak seluas 600 m². Sehingga, total keseluruhannya ialah 3.530 m².

- 2) Ruang Terbuk Hijau (RTH) yang belum masuk dalam ULP tahun anggaran 2015.

Tabel 3.1
Lokasi pembuatan RTH Publik (Belum Masuk ULP) tahun Anggaran 2015

No	LOKASI			LUASAN
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	
Belum Masuk ULP				
1	Jetis	Cokodiningratan	08	340 m ²
		Bumijo	20	555 m ²
2	Umbulharjo	Pendeyan	11	615 m ²
		Giwangan	-	1000 m ²
		Sorosutan	13	250 m ²
		Mujamuju	01	260 m ²
3	Ngampilan	Notoprajan	06	228 m ²
4	Gendongtengen	Sosromenduran	05	240 m ²
5	Kraton	Kadipaten	10	320 m ²
6	Kotagede	Prenggan	04	300 m ²
7	Mergangsan	Keparakan	03	369 m ²
8	Pakualaman	Gunungketur	04	700 m ²
JUMLAH				5.117 m ²

Sumber, data sekunder BLH yogyakarta tahun 2015.

Sedangkan, Lokasi pembuatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) mengenai kecamatan dan kelurahan yang belum masuk ULP tahun anggaran 2015, terdiri dari delapan kecamatan yang meliputi dua belas kelurahan. Kecamatan Jetis meliputi kelurahan Cokodiningratan seluas 340 m². Kecamatan Umbulharjo yang meliputi kelurahan Pendeyan seluas 615 m², Giwangan seluas 1000 m², Sorosutan seluas 250 m², dan kelurahan Mujamuju seluas 260 m². Untuk kecamatan Ngampilan, hanya meliputi satu kelurahan yaitu kelurahan Notoprajan dengan luas 228 m². Kecamatan Gendongtengen meliputi satu kelurahan Sosromenduran memiliki luas 240 m². Kecamatan Kraton meliputi kelurahan kadipaten memiliki luas 320 m². Kecamatan Kotagede meliputi kelurahan Prenggan, memiliki luas 300 m². Kecamatan Mergangsan meliputi kelurahan Keparakan seluas 369 m². Dan terakhir Kecamatan Pakualaman meliputi Kelurahan Gunungketur memiliki luas 700 m². Maka, total keseluruhannya adalah seluas 5.117 m².

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH Perkotaan.

Dalam mewujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmoniskan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Salah satu pengembangan antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan kota hijau. Salah satu atribut yang menjadi fokus terkait “ *Green Open Space*” yakni berupa peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ada satu hal penting. Bahwa, kuantitas RTH yang minim diiringi dengan kualitas rendah menyebabkan keseimbangan daya dukung ekologis

lingkungan kota tidak terjaga. Untuk menindak lanjuti rencana aksi yang telah disepakati. Maka, pemerintahan kota yogyakarta pada tahun 2013 RTH mengalami peningkatan kuantitasnya. Artinya, pemerintahan kota, melalui BLH mewujudkan kota hijau melalui implementasi secara fisik dalam ruang kotanya. Peningkatan jumlah RTH menjadi sasaran utama implementasi fisik dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan perkotaan dengan meningkatkan kualitas penataan ruang kota. Sebab, fasilitasi implementasi pengembangan RTH dimaksudkan sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya kota hijau melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini, sebagai mana dijelaskan oleh narasumber dibawah ini adalah sebagai berikut :

“Kenapa penting RTH. Sebab, tingginya tingginya tingkat pertumbuhan penduduk harus sangat diiringi oleh sarana dan prasarana. Salah satunya yaitu : Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sebagai interaksi publik. memberi kesegaran, kenyamanan, dan karena keindahan sebagai paru-paru kota.kegiatan ini diharapkan dapat terbangunnya area RTH publik yang terintegrasi dan dapat memberikan fungsi intraksi sosial secara aktif bagi kota.”¹⁴

Dari data diatas dapat, penulis jelaskan. Bahwa, peningkatan sarana dan prasaran (Ruang Terbuka Hijau) sangat penting. Sangat penting, dalam pemahaman bahwa perlu ada keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penyediaan sarana dan prasaran pulikn (RTH). Fasilitasi implementasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimaksud agar adanya interaksi sosial masyarakat atau interaksi publik. Memberikan, kesegaran

¹⁴ Ibid.

bagi setiap individu yang sedang menikmati udara kota. Sementara, sisi estetika (keindahan alam) dapat membuat iklim kota semakin indah. Lain sisi, merujuk pada landasan secara formil tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat diketahui dari penjelasannya ialah sebagai berikut : “Bahwa, untuk menjamin ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) berkelanjutan di Kota Yogyakarta dan dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan antar warga masyarakat serta menuju lingkungan yang sehat dan nyaman, maka perlu didukung ketersediaan RTHP sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat. (poin a) penjelasan peraturan walikota yogyakarta No. 64 Tahun 2013). Serta, pedoman peraturan Walikota Yogyakarta No. 72 tahun 2010 tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Yogyakarta lebih lanjut terkait peningkatan dari tahun-ketahun dapat penulis tampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

a) Prosentase Luas Taman dan Ruang Terbuka Hijau Publik tahun 2012-2013

Tabel. 3.2
Prosentase luas taman dan Ruang Terbuka Hijau Publik tahun 2012-2014.

Tahun		2012	2013	2014
1	Penambahan luas taman kota (m ²)	1.646 m ²	4.653m ²	4.125m ²

2	Kumulatif luasan taman kota (m ²)	5.595.622 m ²	5.652.312 m ²	5.927.428 m ²
3	Penambahan luas taman pergola (m ²)	108 m ²	3.608 m ²	4.355 m ²
4	Kumulatif luasan taman pergola	108 m ²	3.716 m ²	7.963 m ²
5	Penambahan jumlah pohon perindang/jalur hijau (pohon)	3372 pohon	3.595 pohon	23.659 pohon
6	Kumulatif jumlah pohon perindang/jalur hijau (pohon)	17.792 pohon	21.387 pohon	23.659 pohon
7	Konversi luasan pohon perindang (m ²)	160.128 m ²	192.483 m ²	212.931 m ²
8	Penambahan luas RTH lingkungan permukiman m ²	0	9.398 m ²	4.281 m ²
9	Kumulatif luasan RTH lingkungan permukiman m ²	0	9.398 m ²	13.679 m ²
Total penambahan luasan taman kota, taman pergola, pohon perindang dan RTH lingkungan		31.994 m ²	48.460 m ²	33.209 m ²
Kumulatif penambahan luas kota, taman bergola, pohon perindang dan RTH lingkungan.		5.755.750 m ²	5.857.800 m ²	5.755.750 m ²
Peningkatan prosentase luasan RTH publik dari luas wilayah kota yogyakarta		17,71%	18.024%	18,95%

Sumber, data skunder BLH yogyakarta tahun 2015.

Dari tabel 3.6 diatas. Prosentase luas taman dan Ruang Terbuka Hijau Publik RTHP dari tahun ketahun dapat meningkat. Maka, secara ditail dapat dijabarkan. Bahwa, Penambahan luas taman kota pada tahun 2011, seluas 1.646 m². Sedangkan pada tahun 2012. Menjadi 4.653m², dan pada tahun 2013 seluas 4.125m². Untuk kumulatif luasan taman kota pada tahun 2011 5.595.622 m². Sedangkan, pada tahun 2012. Menjadi 5.652.312 m², dan pada tahun 2013 seluas 5.927.428 m². Penambahan luas taman pergola, pada tahun 2011 seluas 108 m². Sedangkan pada tahun 2012 seluas 3.608 m². dan pada tahun 2013 seluas 4.355 m².

Semnetara, Kumulatif luasan taman pergola pada tahun 2011 seluas 108 m². Sedangkan, pada tahun 2012. Menjadi 3.716 m², dan pada tahun 2013 seluas 7.963 m². Penambahan jumlah pohon perindang/jalur hijau (pohon), pada tahun 2011 berjumlah 3372 pohon Sedangkan, pada tahun 2012. Menjadi 3.595 pohon dan tahun 2013 meningkat dengan jumlah 23. 659 pohon. Kumulatif jumalh pohon perindang/jalur hijau (pohon) pada tahun 2011 berjumlah 17.792 pohon, Sedangkan, pada tahun 2012. Menjadi 21. 387 pohon dan tahun 2013 meningkat dengan jumlah 23.659 pohon.

Untuk konversi luasan pohon prindang, pada tahun 2011 seluas 160.128 m². Sedangkan, pada tahun 2012. Menjadi 192. 483 m², dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 212.931 m². Penambahan luas RTH lingkungan permukiman, pada tahun 2011 yaitu kosong. Sedangkan, pada tahun 2012 seluas 9.398 m². Dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 4.281 m².

Kumulatif luasan RTH lingkungan permukiman, tahun 2011 yaitu kosong. Sedangkan, pada tahun 2012 seluas 9.398 m² dan Dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 13. 679 m².

Dari penjelasan diatas, maka totalitas secara keseluruhan adalah sebagai berikut total penambahan luasan taman kota, taman pergola, pohon perindang dan RTH lingkungan pada tahun 2011 seluas 31. 994 m². Sedangkan pada tahun 2012 seluas 48. 460 m². Dan pada tahun 2013 seluas 33. 209 m². Untuk, Kumulatif penambahan luas kota, taman bergola, pohon perindang dan RTH lingkungan pada tahun 2011 seluas 5.755.750 m². Dan pada tahun 2013 seluas 5.755.750 m². Oleh karena itu secara keseluruhan, Peningkatan prosentase luasan RTH publik dari luas wilayah kota yogyakarta pada tahu 2011 berjumlah 17,71%. Sementara pada tahu 2012 berjumlah 18.024%. dan pada tahun 2013 berjumlah 18,95%.

b) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau keseluruhan (Publik + Privat)

Untuk mengetahui prosentase peningkatan kuantitas RTH secara keseluruhan yanitu : publik maupun privat. Maka, selanjutnya akan dimunculkan prosentase dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

Tabel 3.3
Peningkatan RTH keseluruhan (publik maupun Privat) dalam angka 2012-2014

No	Tahun	2012	2013	2014
1.	Peningkatan luasan RTH Publik	17,71%	18,024%	18,98%

2	Peningkatan luasan RTH privat	14,59 %	14,69%	14,71%
3	Luasan RTH keseluruhan publik dan privat	10.497.500m ²	10.633.476m ²	10.942.750 m ²
	Prosentase luasan RTH dari Wilayah kota Yogyakarta	32,3%	32.71%	33.67%

Sumber, data skunder BLH yogyakarta tahun 2015

Dari data tabel 3.7 ini selanjutnya dapat dijelaskan. Bahwa, Peningkatan RTH keseluruhan (publik maupun Privat) dalam angka 2011-2013 adalah sebagai berikut : Peningkatan luasan RTH Publik pada tahun 2011 sebesar 17,71%. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 18,024%. Dan, pada tahun 2013 sebesar 18,98%. Peningkatan luasan RTH privat pada tahun 2011 sebesar 14,59 %. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 14,69%. dan pada tahun 2013 sebesar 14,71%. Dan terakhir adalah prosentase luas Luasan RTH keseluruhan publik dan privat pada tahun 2011 seluas 10.497.500m². pada tahun 2012 seluas 10.633.476m². dan pada tahun 2013 seluas 10.942.750 m². Sehingga besaran Prosentase luasan RTH dari Wilayah kota Yogyakarta , keseluruhan pada tahun 2011 sebesar 32,3%, pada tahun 2012 sebesar 32.71% dan pada tahun 2013 sebesar 33.67%.

3. Koordinasi unit organisasi

Kata koordinasi secara yang penulis pahami sebagai suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya memberikan jumlah yang tepat, waktu

dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakhibatkan tidakan terpadu dengan untuk tujuan lain. Koordinasi dipandang sebagai kewenangan untuk mengerakan dan menyeimbangkan kegiatan yang berbeda atau spesifik. Dengan adanya koordinasi, semua kegiatan diarahkan pada pencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan.

Maka, mekanisme yang perlu dipakai sebagai cara untuk mendukung pencapaian tujuan adalah tingkat koordinasi. Sementara, garis koordinasi yang jelas tentunya semakin efektif dan terkontrol baik itu proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan maupun pengawasannya. Hal itu, juga sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Dan untuk memanfaatkan fungsi RTHP pemerintah harus menggandeng atau berkoordinasi dengan RT/RW dalam hal memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau RTH. Sebab, koordinator menjamin kerja efektif dan efisien maupun cepat, tepat serta terkontrol.”¹⁵

Mekanisme atau cara memaksimalkan RTH semakin efektif dan efisien. Serta, akan cepat, tepat dan terkontrol tentunya harus melalui suatu tingkatan koordinasi yang jelas. Kunci utama, dari koordinasi berfungsi agar elemen pemerintah dibagian bawah (RT/RW) juga turut aktif terlibat memaksimalkan program RTH. Upaya, kerja sama (kooperatif) lintas instansi pemerintah seperti ini lebih mendukung peluang keberhasilan. Lain sisinya, koordinasi

¹⁵ Ibid.

menjamin integrasi dan atusias kerja maka akan lebih mudah menghadapi peluang dan maslah-masalah sebagai efek dari kebijakan RTH. Maka, sebaliknya akan lebih sulit sebuah instansi memainkan tingkat keuntungan, profitabilitas, dan produktivitas jika tanpa ada jalur koordinasi serta perencanaan yang sistematis. Begitu juga secara formil, mekanisme koordinasi ini merupakan keterhubungan dari bagian-bagian terpisah. Untuk itu, penulis dapat memahami sebagai rangkain komponen sistem yang tidak terpisahkan dari program memaksimalkan RTH.

4. Sosialisasi dan kampanye publik tentang kota hijau.

Sosialisasi secara sederhananya yang penulis pahami, itu merupakan proses penyamapain informasi kepada stekholder atau masyarakat umum. Dalam, hal apapun sosialisasi tentang target tujuan, program mapun fungsi dan manfaat dari sebuah kebijakan itu sangat penting. Kandang kala, suatu urusan kebijakan pemerintah tanpa didasari pada prinsip keterbukaan (transparansi) dan dalam hal ini sosialisasi. Sangat rentan, terhadap kekacauan kebijakan. Karena, sosialisasi ini mampu mengarahkan program untuk berjalan sesuai rencana atau mengalami kendala. Bahkan kelebihan dari sosialisasi itupun mampu, memberikan pengetahuan bagi pelaku kebijakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman.

Pada aspek lain, dapat memberikan informasi lain untuk mengidentifikasi isu-isu strategisnya. Atau, menjadi bahan untuk mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif

tersebut. Salah satu, kendala terbesar dari program dan target tujuan memaksimalkan RTH ini sebab krang adanya pemeliharaan serta kurangnya pengawasan bersama. Subtansi atau yang paling mendasar dari permasalahan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oleh karena itu, informasi mengenai wawasan akan lingkungan hidup sangat penting dalam merespon seluruh lapisan masyarakat. Bergerak aktif, menumbuhkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini, sebagaimana pernyataan narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Adanya sosialisasi bentuk dan fungsi ekologis RTH. Masyarakat akan akan memberikan tambahan pengetahuan, tentang apa saja yang digolongkan sebagai RTH. Sehingga memanfaatkan potensi alam. Untuk dijadikan RTH. Sosialisasi tentang RTH perlu dilakukan sehingga ketersediaan tidak hanya dijadikan wahana. Rekreasi semata. Namun juga untuk kebutuhan hidup manusia. Seperti sebagai saran interaksi sosial masyarakat. Dan membangun kesejahteraan masyarakat. Atau akan mewujudkan hidup berkelanjutan. Pengenalan terhadap tanaman (taman) perlu diperkenalkan karena taman dapat memberikan kualitas hidup tinggi. dan diharapkan agar memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Akhibat dari kurang sosialisasi bisa menimbulkan masalah. Seperti kurang adanya pemeliharaan bersama atau krang adanya kesadaran untuk keindahan lingkungan itu sendiri.”¹⁶

Merujuk pada pernyataan narasumber ini. Tentu sekali, sosialisasi termasuk hal penting dalam rumusan strategi pencapaian tujuan. Dalam artiannya, melakukan sosialisasi berarti membuka alur komunikasi yang baik lintas vertikal atau horizontal. Ketika susunan informasi mengenai RTH. Telah

¹⁶ Ibid

diterima oleh stekholder atau masyarakat umum maka dijamin adanya tambahan pengetahuan. Seperti, pengetahuan akan begitu pentingnya pemanfaatan ekosistem (ekologi) alam dalam meningkatkan taraf kehidupan. Sementara, tidak banyak masyarakat memahami lingkungan ekologi sebagai kebutuhan hidup. Sebaliknya, tidak sedikit orang menjadikan ekologi hanya sebatas rekreasi semata. Padahal, fungsi dari pada meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupan sosial. Seperti, sebagai wahana interaksi sosial masyarakat.

Kedudukan sosialisasi pada tahapan ini, diposisikan sebagai fungsi edukasi (memberikan pendidikan kepada masyarakat) akan pentingnya RTH. Selanjutnya, membangun kesadaran partisipasi dan terlibat langsung tentang aktivitas peningkatan kualitas RTH. Partisipasi masyarakat, dimanfaatkan untuk merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala yang ada. Sedangkan dalam perumusan strategi kemungkinan terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yaitu, terletak pada pembuat keputusan, misalnya tekanan-tekanan politik, sosial, kondisi ekonomi, persyaratan prosedural, komitmen, waktu yang terbatas.

Pertimbangan efisiensi dan alokasi waktu pada prosedur dan langkah teknis memang perlu dipikirkan. Tentunya, bersinggungan dengan masalah kecepatan dan ketepatan sebuah rencana program. Bahkan, prosedur terlalu terikat oleh nilai-nilai keorganisasian terkesan kaku. Serta, bergerak lambat

saat ketersediaan sumberdaya yang kurang memungkinkan. Sehingga, keterlibatan elemen lain akan sangat membantu kecepatan meraih tujuan utama. Seperti pemebentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK). Hal ini, sebagaimana pernyataan narasumber dibawah ini ialah sebagai berikut :

“Sosialisasi itu dilakukan karena menjadi suatu kewajiban pemerintah. Dan target operasi menjadi sasaran itu jelasnya masyarakat umum dengan prioritas generasi muda. Dan mereka secara kelompok yang berorganisasi juga. Dan mereka secara sukarela karena kesamaan minat untu membangun RTH. Langkah-langkahnya itu temu warga dalam agenda-agenda pemerintah. Melalui pihak kelurahan/kecamatan. Karena itu koordinasi itu sangat penting. Dan alat praga, seperti brosur dan dijelaskan mengani fungsi, manfaat , dan pentingnya meningkatkan kualitas RTH. Sosialisasi itupun, suda masuk dalam (press relese) ke media massa. Dengan memberikan bahan-bahan tertulis. sementara kita dihadapkan oleh lahan. Lahan dibeli, dari lahan penduduk yang kan dibeli TAPEM”¹⁷

“Dari tahun 2012 kemarin. Kami sudah melakukan pergerakan-pergerakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat peduli kota hijau. Terkait, pelibatan masyarakat dalam peningkatan dan pencapaian target RTH.”

Peranan memeberikan informasi kepada khalayak banyak, merupakan kesatuan dari prosedur kerja. Dalam artian sosialisasi, sudah menjadi tugas dan kewajiban (prinsip keterbukaan pemerintah). Demikian halnya, bahwa target operasi program harus diklasifikasikan berdasar klas masyarakat. Sehingga, kelompok penerima informasi pengetahuan tentang RTH diprioritaskan pada generasi mudah. Atau kepada, kelompok-kelompok

¹⁷ Ibid

masyarakat secara sukarela ingin membangun RTHnya. Jikalau proses penyerapan informasi mengenai RTH ini cenderung lemban maka tujuan memaksimalkannya juga akan cenderung lambat. Apalagi terkait persoalan administrasi yang bersinggungan dengan tata cara permohonan RTH. Karena secara formil, tata cara permohonan RTH itu berpedoman pada peraturan walikota Yogyakarta No.64 tahun 2013. Sebagaimana, penjelasannya bahwa :

“ Permohonan RTHP diajukan oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) penjelasan (pasal 3 Ayat 1).

Karena itu, meskipun sosialisasi suda masuk dalam (*press relese*) ke media massa. Dengan memberikan bahan-bahan tertulis. Namun, kendala memungkinkan Ruang Terbuka Hijau teidak berjalan sesuai rencana awal jikalau para penerima informasi belum mampu memahi prosedur dan langkah-langkah taktis peningkatan RTH. Sedangkan, proses penyampaian informasi sudah dilakukan semenjak tahun 2012. Dengan, melakukan pergerakan-pergerakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat peduli kota hijau. Terkait, pelibatan masyarakat dalam peningkatan dan pencapaian target RTH.

5. Pembentukan Forum Kota Hijau Yogyakarta (FKH)

Forum komunitas hijau (FKH) ini adalah forum komunikasi / kelompok warga yang peduli pada masalah lingkungan di kota / kabupaten tertentu, terutama membangun interaksi social warga terhadap pemanfaatan Ruang terbuka hijau.

Forum kota hijau ini terdiri dari perwakilan komunitas / kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kelompok / komunitas warga adalah perkumpulan yang berfifat keanggotaan terbuka, berorientasi social yang sudah aktif dalam satu tahun terakhir mengadakan kegiatan kegiatan yang mengangkat isu lingkungan. Contoh komunitas warga yang dimaksud antara lain komunitas bike2work, komunitas motor, komunitas berkebun , karang taruna, pramuka, kesenian dll.

Disini masyarakat yang menjadi target sasaran kegiatan forum RTH adalah yang berada dalam kelompok usia 16-30 tahun (remaja, pemuda, komunitas pengingat lingkungan yang aktif, tokoh tokoh muda, spirit yang dinamis , serta membawa perubahan. Contohnya : karang taruna, kelompok pemuda territorial, siswa dan siswi tingkat atas / SLTA, komunitas seni dan budaya, komunitas peduli lingkungan, komunitas olahraga, komunitas hobi, masyarakat yang peduli.

Dan ada pun tujuan dibentuknya forum kota hijau adalah untuk membangun kesadaran warga dan pemerintah daerah tentang pentingnya kota hijau, menyatukan visi kota hijau antara warga dan pemerintah serta membangun partisipasi warga dalam program program kota hijau. Berikut adalah beberapa pelaksanaan kegiatan forum kota hijau: Sosialisasi dan temu warga tingkat kelurahan dan kecamatan tentang kota hijau, Talkshow di radio dan tv lokal untuk melakukan talkshow atau penyuluhan mengenai fungsi dan manfaat kota hijau, sosialisasi ke sekolah sekolah akan pentingnya RTH, kampanye lewat media massa, mengadakan festival ruang terbuka hijau.

Sebuah organisasi harus bisa melihat lingkungan internal dan eksternal. Karena, dari kedua lingkungan itu akan dapat dilihat peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dari organisasi tersebut dan staff harus dapat mengidentifikasi isu yang ada agar organisasi cepat tanggap didalam ataupun diluar lingkungan organisasi. Penting dari pemerintah mengedepankan FKH dengan tujuan agar pemahaman warga tentang pentingnya kota hijau sebagai fungsi kota berkelanjutan. Secara formil, berkesesuaian dengan pedomaan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2002 tentang “Pedomaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) RT dan RW. Lembarana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2008 Nomor 31 seri B.” Implikasi/keterlibatan langsung dari faseh ini adalah agar meminimalisir tekanan pengaruh yang datang dari luar lingkungan internal organ. Hal ini, sebagaimana pernyataan narasumber dibawah ini ialah :

“Program memaksimalkan RTH. Terdapat atribut yang harus dipenuhi. Seperti Green Community menjadi salah satu atribut penting. Dan keterlibatan masyarakat itu penting. Melalui pembentukan Forum Komunitas Hijau (FKH) adalah sarana mewadahi komunitas yang sudah ada. Seperti komunitas Keindahan kota. Seperti forum Winongo, forum Jode. Dimulai dari kelompok yang tergabung kemudian akan menyebar kesegmen masyarakat. Untuk saling belajar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kota hijau. Karena, dibalik pengaruh internal. Pengaruh eksternal menjadi faktor pendukung. Karean itu, perlu peningkatan pengetahuan masyarakat dan kepedulian yang diawali dengan memehami pentingnya RTH dikota. Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan RTH yang ada, serta berperan dalm peningkatan kualitas RTH.”¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ir. Indiyah Widiningsih, Kepala Bidang Keindahan Balai Kota Yogyakarta. Tanggal 3 bulan 11 tahun 2015

Dari data ini, dapat penulis jelaskan. Bahwa, target tujuan memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan program-program lain harus memiliki atribut atau berupa perangkat yang berfungsi. Perangkat yang berfungsi sebagai sarana penunjang pencapaian tujuan. Seperti, Forum Komunitas Hijau (FKH). Tujuan dari adanya forum ini adalah melakukan penyadaran kolektif terhadap masyarakat. Dan, memberikan pendidikan berupa keterangan terkait pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi sebuah kota. Kontribusi, atas adanya FKH secara langsung menjaga kestabilan politik diwilayah luar lingkungan maupun internal organisasi pemerintah.

Tentunya, rencana aksi Forum Komunitas Hijau Yogyakarta berisikan program-program yang mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH. Dan, merangkul harapan harapan dan aspirasi terhadap RTH. Sisi lain dari memberikan penguatan pengetahuan, relasi kerja tidak terpisahkan dengan program internal. Menyangkut, target tujuan dan program-program yang ingin dicapai. Untuk itu, penulis menyajikan prosentase keberhasilan taman yang merupakan bagian program dalam memaksimalkan RTH kota Yogyakarta.

Peningkatan taman kota, dilakukan oleh bidang keindahan. Dan presentase keberhasilan taman kota dapat diketahui dari bagan dibawah ini.

Tabel 3.4
Daftar laporan kegiatan bidang keindahan tahun 2013.

No	MACAM PEKERJAAN	LOKASI	JML	SAT	KONVERSI LUAS (M ²)
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Taman Kota					
1	Penataan taman dan RTH RW.08 kel. Giwangan	Kel. Giwangan	1	unit	80 m ²
2	Penataan taman dan RTH RW.16 Kel. Sorosutan	Kel.Sorosutan	1	unit	40 m ²
3	Penataan taman dan RTH RW 12 kel. Syuriatmajan	Kel. Syuriatmajan	1	unit	64 m ²
4	Penataan taman dan RTH RW 03 Kel. Tegalpanggung	Kel. Tegalpanggung	1	unit	80 m ²
5	Penataan taman dan RTH RW 01 Kel. Bener	Kel. Bener	1	unit	48 m ²
6	Penataan taman dan RTH RW 08 Kel. Kricak	Kel. Kricak	1	unit	33 m ²
7	Penataan taman dan RTH RW 05 Kel. Karangwaru	Kel. Karangwaru	1	unit	40 m ²
8	Penataan taman dan RTH RW 08 Kel. Tegalrejo	Kel. Tegalrejo	1	unit	60 m ²
9	Penataan taman RW 09 Kel. Bumijo	Kel. Bumijo	1	unit	6115,16 m ²
10	Penataan taman RW 10 Kel. Bumijo	Kel. Bumijo	1	unit	77,53 m ²

11	Penataan taman RW 11 Kel. Bumijo	Kel. Bumijo	1	unit	55 m ²
12	Penataan taman RW. 13 Kel. Bumijo	Kel. Bumijo	1	unit	56 m ²
13	Penataan taman dan dan pergola sepanjang sungai RW 02 serangan, Kel. Ngampilan	Kel. Ngampilan	1	unit	52 m ²
14	Penataan taman dan dan pergola sepanjang sungai RW 04 Tojokusuman, Kel. Ngampilan	RW 04 Tojokusuman, Kel. Ngampilan	1	unit	170 m ²
15	Penataan taman dan dan pergola sepanjang sungai RW14,15,16 17 Kel.Prawirodirjan	RW14,15,16 17 Kel.Prawirodirjan	1	unit	26 m ²
16	Penataan taman dan dan pergola Jl.KHA.Dahlan, Kel. Ngupasan	RW 09 Kel.Ngupasan	1	unit	80 m ²
17	Penataan taman dan dan pergola Jl.Agus Salim RW 09, Kel. Notoprajan	Kel. Notoprajan	1	unit	76 m ²
JUMLAH			17	unit	7158, 69 m²

Sumber, data primer BLH yogyakarta tahun 2013

Dari tabel 3.1 bahwa kegiatan peningkatan taman kota hasil laporan bidang keindahan tahun 2013. diatas dapat penulis jelaskan sebagai berikut :
Penataan taman dan RTH RW.08 kel. Giwangan berlokasi di kel. Giwangan

berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 80 m². Penataan taman dan RTH RW.16 Kel. Sorosutan. berlokasi di kel. Sorosutan berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 40 m². Penataan taman dan RTH RW 12 kel. Syuriatmajan. kel. Syuriatmajan, berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 64 m².

Penataan taman dan RTH RW 03 Kel. Tegalpanggung. Kel. Tegalpanggung. berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 80 m². Penataan taman dan RTH RW 01 Kel. Bener, Kel. Bener. berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 48 m². Penataan taman dan RTH RW 08 Kel. Kricak. Kel. Kricak, berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 33 m². Penataan taman dan RTH RW 05 Kel. Karangwaru. Kel. Karangwaru. berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 40 m². Penataan taman dan RTH RW 08 Kel. Tegalorejo. Kel. Tegalorejo, berjumlah 1 unit dengan menggunakan lahan seluas 60 m². Penataan taman RW 09 Kel. Bumijo. Kel. Bumijo, berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 6115,16 m². Penataan taman RW 10 Kel. Bumijo. Kel. Bumijo, berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 77,53 m².

Penataan taman RW 11 Kel. Bumijo. Kel. Bumijo, berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 55 m². Penataan taman RW. 13 Kel. Bumijo. Kel. Bumijo. berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 56 m². Penataan taman dan dan pergola sepanjang sungai RW 02 serangan, Kel. Ngampilan. Kel. Ngampilan. berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 52 m². Penataan taman dan dan pergola

sepanjang sungai RW 04 Tojokusuman, Kel. Ngampilan. Kel. Ngampilan, berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 170 m². Penataan taman dan dan pergola sepanjang sungai RW14,15,16 17 Kel.Prawirodirjan. Kel.Prawirodirjan, berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 26 m².

Penataan taman dan dan pergola Jl.KHA.Dahlan, Kel. Ngupasan. Kel. Ngupasan, berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 80 m². Penataan taman dan dan pergola Jl.Agus Salim RW 09, Kel. Notoprajan. Kel. Notoprajan, berjumlah 1 unit dengan menggunakan presentase seluas 76 m². Maka, total secara keseluruhan sebesar 7158, 69 m².

Begitu juga, program penyuluhan dalam mengedepankan kesadaran masyarakat tentang partisipasi mereka untuk mendorong kerjasama. Kerja sama, dimaksimalkan agar pemeliharaan RTH akan menjadi tanggungjawab bersama. Karena, jikalau dipandang secara fungsional ternyata RTH memiliki fungsi yang banyak. Seperti fungsi ekologi, fungsi sosial, fungsi ekonomi dan budaya. Hal ini, sebagaimana yang dinyatakan narasumber dibawah ini :

“Memaksimalkan RTH sangat membawa manfaat bagi masyarakat. Maka, perlu mendorong krja sama/partisipasi masyarakat. Seperti pemeliharaan dan kebersihan lingkungan. keterlibatan masyarakat pemerintah baru hanya terbentuk diwilayah kota Yogyakarta. Kerjasama masyarakat ini dibentuk dalam forum-forum resmi. Seperti forum Winongo, forum Jode. Karean Ruang Terbuka Hijau ini memiliki fungsi secara ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Fungsi ekologi dari RTH itu bisa memperbaiki iklim mikro dengan harapan mengandung hewan-hewan. Begitu juga, fungsi sosial. Fungsi sosial bisa sebagai sara penunjang interaksi sosial masyarakat. Sedangkan fungsi ekonomi dari RTH adalah

pengembangan kesejahteraan masyarakat dan fungsi budaya adalah sebagai tempat pengenalan seni sastra (pentas seni).”¹⁹

Merujuk pada data wawancara ini. Tujuan memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya menyuguhkan keindahan kota secara sentral. Namun, lebih jauhnya berkontribusi besar terhadap kondisi ekologi alam. Dalam hal ini, RTH mampu menyediakan suhu udara yang sehat. Seperti, kesegaran udara ataupun pendayagunaan oksigen yang baik bagi manusia. Dan, tentunya menjaga kelestarian spesies hewan-hewan. Terutama, hewan-hewan langka. Fungsi secara sosial, sebagaimana pernyataan narasumber adalah sebagai suatu wadah interaksi langsung individu masyarakat setempat dan disekitar kota. Interaksi sosial bagi penulis tidak sebatas pada melakukan komunikasi lintas individu atau masyarakat. Namun, lebih substantif adalah menjalin harmonisasi, membentuk etika sosial, bahkan mendorong masyarakat pada wilayah eksperimentasi kehidupan. Seperti, rasa kecintaan terhadap alam dan tumbuhnya semangat hidup.

Dari sudut pandang estetika, justru keindahan alam yang ditimbulkan dari RTH. Dapat, meningkatkan kenyamanan mempeperindah lingkungan kota. Dukungan keindahan alam yang aktif, mampu menstimulasi kemampuan kreatifitas dan produktivitas warga. Seperti : mendorong para seniman melakukan eksperimentasi untuk menghasilkan karya seni sastra yang bermotif keindahan alam.

¹⁹ Ibid.